



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370
KOTA BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 050/Kep.2092-Bappelitbang/2022

TENTANG

PERLUASAN KELURAHAN LOKUS

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING

DI KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Lokasi Kelurahan untuk Program Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.750-Bappelitbang/2021, namun dalam perkembangannya diperlukan perluasan kelurahan lokasi fokus intervensi untuk percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perluasan Kelurahan Lokus Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bandung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 27);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 09236/PP.06.02/D.5/T/07/2022 tentang Penyampaian Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023;
 2. Berita Acara Penyepakatan Penambahan Lokus Kelurahan Intervensi *Stunting* Tahun 2023, Tanggal 20 Juli 2022;
 3. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.381-Bappelitbang/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perluasan Kelurahan Lokus Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA : Perluasan dan Pemilihan Kelurahan Lokus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 050/Kep.2092-Bappelitbang/2022
 TANGGAL : 4 Agustus 2022

PENETAPAN PERLUASAN KELURAHAN LOKUS
 PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
 DI KOTA BANDUNG TAHUN 2023

No.	Kecamatan	Kelurahan	STUNTING		
			Jumlah Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Balita Pendek dan Sangat Pendek	Prevalensi Stunting (%)
Tahun Penetapan 2020 / 2021					
1	Astana Anyar	Karasak	-	69	11.41
2	Babakan Ciparay	Ciranrang	-	33	5.25
3	Babakan Ciparay	Margasuka	-	69	9.43
4	Batununggal	Kebon Gedang	-	51	6.94
5	Bojongloa Kaler	Jamika	-	40	6.80
6	Bojongloa Kaler	Babakan Asih	-	42	4.64
7	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul	-	98	12.20
8	Cibiru	Palasari	-	181	13.67
9	Cibiru	Cipadung	-	126	11.32
10	Cinambo	Babakan Penghulu	-	46	10.65
11	Lengkong	Cikawao	-	64	17.83
12	Lengkong	Birangrang	-	20	7.25
13	Panyileukan	Cipadung wetan	-	15	3.88
14	Sukajadi	Sukawarna	-	15	2.46
15	Ujungberung	Pasirjati	-	119	10.93
Tahun Penetapan 2022					
16	Antapani	Antapani Tengah	-	85	7.54
17	Andir	Ciroyom	-	77	7.37
18	Andir	Kebon Jeruk	-	29	8.63
19	Bandung Kulon	Caringin	-	57	5.75
20	Bandung Kulon	Warung Muncang	-	52	6.34
21	Bandung Kidul	Kujang Sari	-	88	1.538
22	Batununggal	Kebonwaru	-	56	10.33
23	Bojongloa Kidul	Situsaeur	-	31	3.60
24	Bojongloa Kidul	Kebonlega	-	30	2.59
25	Cibeunying Kaler	Cigadung	-	12	1.80

26. Cibeunying Kidul ...

26	Cibeunying Kidul	Cicadas	-	23	3.47
27	Cibeunying Kidul	Sukamaju	-	51	5.65
28	Coblong	Cipaganti	-	14	8.09
29	Kiaracondong	Cicaheum	-	96	10.80
30	Regol	Cigereleng	-	8	5.48
Tahun Penetapan 2023					
31	Arcamanik	Sukamiskin	2811	112	17.69
32	Arcamanik	Cisaranten Kulon	3996	116	7.27
33	Arcamanik	Cisaranten Endah	3195	150	13.88
34	Antapani	Antapani Kidul	3053	94	11.74
35	Babakan Ciparay	Sukahaji	2315	153	17.53
36	Babakan Ciparay	Margahayu Utara	2784	171	35.26
37	Babakan Ciparay	Babakan	4704	176	19.45
38	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	5565	120	11.86
39	Batununggal	Cibangkong	2347	141	16.24
40	Bojongloa Kaler	Kopo	4081	174	16.83
41	Bojongloa Kaler	Sukaasih	2756	74	8.23
42	Buahbatu	Sekejati	3298	83	15.96
43	Buahbatu	Margasari	5973	219	12.56
44	Buahbatu	Cijaura	3825	135	12.61
45	Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	3654	116	13.79
46	Cicendo	Sukaraja	2108	189	22.94
47	Cidadap	Hegarmanah	2676	95	14.26
48	Cidadap	Ciumbuleuit	3856	87	17.86
49	Coblong	Sadangserang	3540	136	11.31
50	Coblong	Dago	4532	125	9.77
51	Mandalajati	Jatihandap	4299	173	11.30
52	Mandalajati	Karang Pamulang	2415	98	10.26
53	Rancasari	Mekarjaya	3345	119	11.67
54	Rancasari	Derwati	3094	119	11.08
55	Sukasari	Sarijadi	3368	117	15.02
56	Ujungberung	Pasanggrahan	3232	81	7.74

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002